



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAMAYANTI TINDUH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 804056

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.848.800.000

1. Tanah Seluas 237.4 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.848.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 611.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU SIRION MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000
3. MOBIL, TOYOTA W101RE-LBVFJ 1.5Q CVT TSS / MINIBUS Tahun 2022, HADIAH Rp. 291.500.000
4. MOTOR, HONDA NF100 LD Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA GR SPORT 1.2 AT / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 172.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 937.105.880

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.472.405.880

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.472.405.880

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.